



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

bakesbangpoldagri|prov.NTB

LAPORAN TAHUNAN 2015

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

JL. PENDIDIKAN NO. 2 MATARAM 83125

www.bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disusun sebagaimana mestinya.

Laporan tahunan ini merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari dana APBD.

Penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya Laporan Tahunan ini, dan diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2014, semoga bermanfaat.

Mataram, 31 Desember 2015

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis yang dihadapi	2
C. RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 – 2018	4
D. Komitmen dalam penerapan program	5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB III IMPLEMENTASI RPJMD DALAM RENSTRA	10
A. Visi dan Misi RPJMD	10
B. Indikator Kinerja yang ingin dicapai	12
C. Indikator RPJMD dan Renstra serta Renja SKPD	13
D. Tujuan	14
E. Sasaran	14
BAB IV PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2015	15
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN	47
A. Permasalahan	47
B. Upaya Penyelesaian	47
C. Rekomendasi	47
D. Kesimpulan	48
BAB VI PENUTUP	49
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menjelang akhir tahun 2015, berbagai kondisi nyata masih mewarnai situasi stabilitas daerah Nusa Tenggara Barat, dan salah satu yang paling menonjol adalah masih maraknya konflik horisontal maupun vertikal di beberapa daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, dalam rangka menghentikan konflik-konflik tersebut, mulai dari pendekatan kultural (budaya lokal) sampai dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum, masih juga belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan masih rendahnya perhatian Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota terhadap pengawasan Islam Garis Keras, sehingga setiap hal dapat dijadikan alasan untuk menjadi penyebab dan pemicu konflik, disamping berbagai faktor lainnya, seperti pemahaman agama, kondisi ekonomi, karakteristik budaya, dan lain sebagainya.

Dibidang politik kita patut bersyukur karena pembangunan kehidupan politik masyarakat telah menunjukkan perbaikan dan kemajuan. Pendidikan politik kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dari setiap parpol, belum sepenuhnya dijalankan oleh parpol-parpol yang ada. Karenanya pemerintah masih harus terus mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam pendidikan politik masyarakat.

Gambaran kondisi diatas menjadi acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan RPJMD 2013 – 2018 dan RENSTRA 2013 – 2018. Upaya untuk menciptakan stabilitas situasi daerah yang mantap, dalam rangka mendukung pembangunan berbagai bidang lainnya, harus terus dilakukan. Tanpa dukungan stabilitas situasi daerah yang baik , maka program-program unggulan

yang dikembangkan pemerintah daerah, tidak akan berjalan dengan baik dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun sebaliknya pula, kegagalan pembangunan bidang-bidang lain akan menjadi pendorong dan pemicu terjadinya instabilitas, karenanya semua bidang perlu dibangun secara simultan, agar kelak secara sinergis memberikan hasil yang optimal.

B. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Interaksi sosial dan politik belum memberikan hasil yang diharapkan, keragaman sosial, budaya dan politik yang ada dan hadir didalam kehidupan masyarakat menjadi penyebab kondisi saat ini. Dalam aspek kebangsaan masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun-tahun berlangsungnya pengembangan sistem politik sebagai akibat tuntutan reformasi; berkembangnya sikap saling kurang menghargai terutama dalam artikulasi politik masing-masing kelompok yang terkait dengan persoalan budaya politik; belum dipahami arti pentingnya wawasan kebangsaan; dan fluktuasi meningkatnya eskalasi politik pada waktu-waktu tertentu. Rasa saling percaya dan harmonis antar kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menciptakan rasa aman dan damai. sejalan dengan fase-fase agenda politik dan kebijakan nasional ataupun pada kejadian-kejadian tertentu yang berdampak luas seperti ancaman terorisme dan sebagainya. Peristiwa pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok yang mewarnai perpolitikan tanah air, merupakan tanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmonisasi kehidupan didalam masyarakat. Hal yang demikian memberikan distorsi atas berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak keseluruhan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan perlu dilakukan koreksi secara terus menerus. Indikasi masih lemahnya integrasi nasional juga muncul dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam format hubungan vertikal pemerintahan pusat dan daerah ataupun dalam format hubungan antar pemerintahan daerah serta antar institusi dalam sistem pemerintahan.

Pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan, melalui berbagai sarana yang ada. Partai politik perlu mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Setiap warga bangsa perlu diingatkan bahwa didalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita bersama sebagai satu bangsa. Peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat belum terlaksana secara baik, pemahaman terhadap undang-undang tentang partai politik masih sangat kurang. Kewajiban dan tanggung jawab partai politik dalam pendidikan politik masyarakat yang diamanatkan undang-undang belum sepenuhnya diperhatikan. Hal ini juga berdampak pada rendahnya angka Indeks Demokrasi Indonesia di NTB.

Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi. Kesenjangan multidimensi juga memiliki potensi untuk semakin memecah belah masyarakat kedalam kelompok-kelompok secara tidak sehat, hal ini dapat merenggangkan hubungan antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang pada gilirannya dapat menjadi awal dari terjadinya disintegrasi. Upaya rekonsiliasi yang masih belum efektif, konflik sosial dan politik dimasa lampau berpotensi muncul kembali kepermukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Masih berkembangnya isu primordialisme kedaerahan, kesukuan (SARA) dalam kehidupan masyarakat dan penataan birokrasi, menjadi perilaku yang dapat melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum sepenuhnya efektif. Pemerintah belum memiliki kapasitas dan kemampuan profesional untuk merespon berbagai konflik yang terjadi ditengah masyarakat, juga belum transparan serta belum melibatkan secara optimal partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diterapkan. Kurangnya koordinasi dan rendahnya saling percaya antar lembaga pemerintah serta antar pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang

efektifnya penyelesaian konflik. Kebijakan yang lebih memperbesar akses masyarakat luas terhadap proses perumusan kebijakan publik, sekaligus memperkecil kesenjangan informasi antar kelompok masyarakat akan sangat menentukan peningkatan saling pengertian antar berbagai kelompok yang ada, peran ormas dan LSM maupun organisasi profesi perlu lebih ditingkatkan.

Dari gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait dengan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi isu strategis adalah "belum terkelolanya dengan baik pluralisme agama, suku dan budaya sebagai modal sosial".

C. RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018, menghadapi kondisi yang menjadi isu strategis "Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial", dengan strategi revitalisasi peran lembaga keagamaan, sosial dan budaya, mengingat lembaga-lembaga tersebut sudah sangat akrab kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat dan peranya sangat diperlukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat serta peningkatan tata susila, semangat nasionalisme dan perilaku masyarakat menjadi arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Kebijakan umum :

- Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial;
- Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur;
- Memfasilitasi forum komunikasi antar umat, etnis, kelompok dan daerah.

Untuk mengimplementasikan bentuk-bentuk kebijakan umum tersebut, maka program-program yang dikembangkan adalah :

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

2. Pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Pendidikan politik masyarakat.

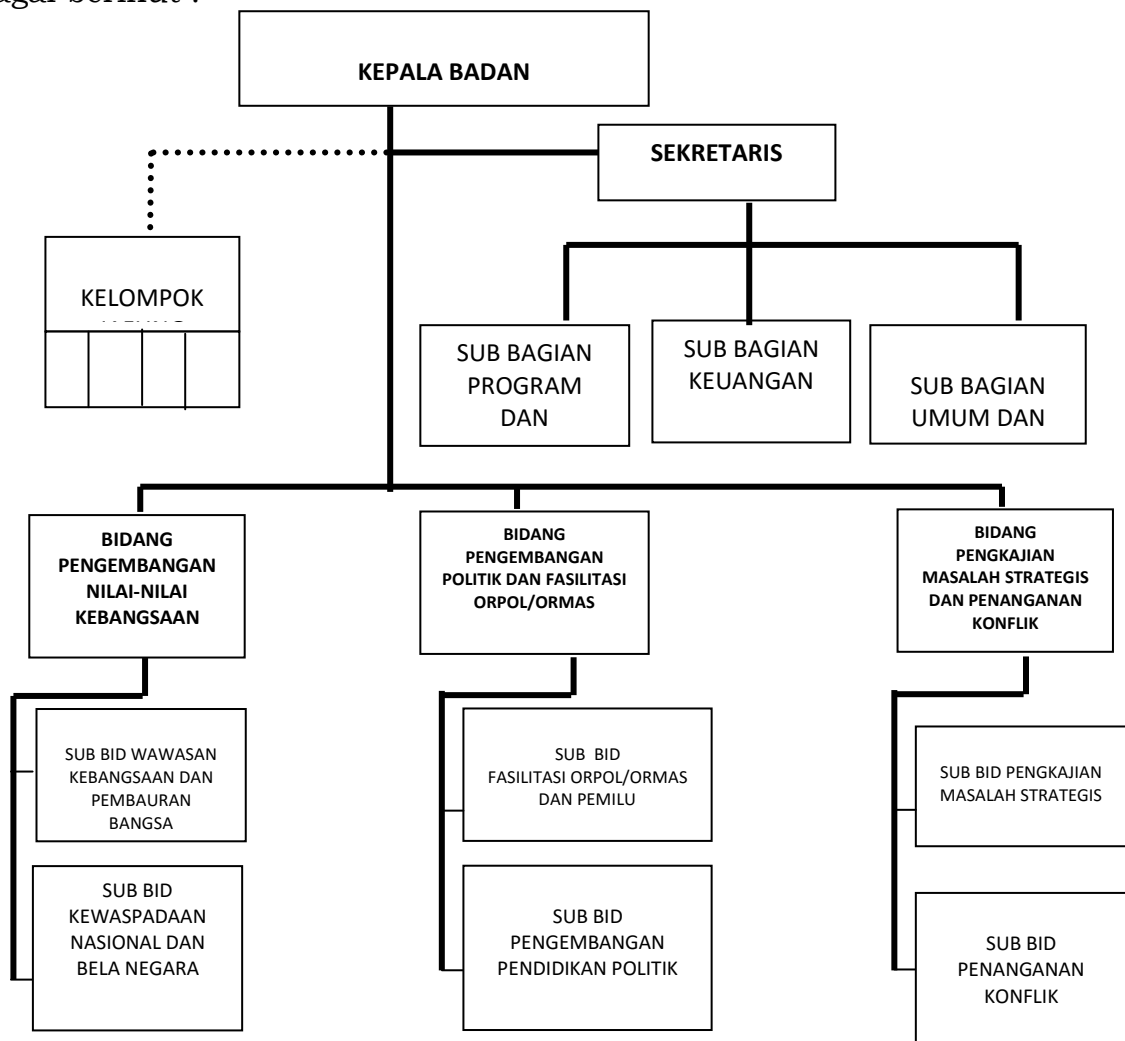
D. KOMITMEN DALAM PENERAPAN PROGRAM

Program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah menciptakan stabilitas daerah yang tertuang dalam RENSTRA merupakan bagian integral dari RPJMN dan RPJMD untuk memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 dan revisinya Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon IIa, 4 (empat) pejabat aselon IIIa dan 9 (sembilan) pejabat eselon IVa dengan struktur organisasi sebagai berikut :



- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
- D. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik;
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.
- E. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun anggaran 2015 per tanggal 31 Desember 2015 dari 14 (empat belas) jabatan struktural semua terisi lengkap, sedangkan untuk jabatan fungsional belum ada.

Jumlah pegawai (PNS) sebanyak 58 orang dengan perincian sebagai berikut : Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV/d : 2 Orang;
- Golongan IV/c : - Orang;
- Golongan IV/b : 2 Orang;
- Golongan IV/a : 5 Orang;
- Golongan III/d : 13 Orang;
- Golongan III/c : 4 Orang;
- Golongan III/b : 8 Orang;
- Golongan III/a : 8 Orang;
- Golongan II/d : 1 Orang;
- Golongan II/c : 5 Orang;
- Golongan II/b : 4 Orang;
- Golongan II/a : 4 Orang;
- Golongan I/d : - Orang;

- Golongan I/c : 1 Orang;
- Golongan I/b : 1 Orang;
- Golongan I/a : - Orang.

2. Berdasarkan Pendidikan :

- Strata 3 (S3) : - Orang;
- Strata 2 (S2) : 8 Orang;
- Strata 1 (S1)/(DIV) : 27 Orang;
- Sarmud (DIII) : 1 Orang;
- SLTA : 15 Orang;
- SLTP : 2 Orang;
- SD : 5 Orang.

3. Mutasi :

Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat terdiri dari :

- Golongan IV : 2 Orang.
- Golongan III : 1 Orang.
- Golongan II : 4 Orang.
- Golongan I : - Orang.

Pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala terdiri dari:

- Golongan IV : 2 Orang.
- Golongan III : 11 Orang.
- Golongan II : 10 Orang.
- Golongan I : 1 Orang.

Pegawai yang pensiun terdiri dari :

- Golongan IV : - Orang.
- Golongan III : 1 Orang.
- Golongan II : - Orang.
- Golongan I : - Orang.

Pegawai yang meninggal dunia terdiri dari :

- Golongan IV : - Orang.
- Golongan III : 1 Orang.
- Golongan II : - Orang.
- Golongan I : - Orang.

Pegawai yang indisipliner atau yang melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin berat dalam tahun 2015 tidak ada.

BAB III

IMPLEMENTASI RPJMD DALAM RENSTRA

A. VISI DAN MISI RPJMD

Visi :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA.”

Misi :

1. Mengembangkan masyarakat madani, berahlak mulia, berbudaya, menghormati pluralistik dan kesetaraan gender;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
3. Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah;

Mengacu pada visi dan misi RPJMD maka RENSTRA Bakesbangpoldagri Provinsi NTB 2013 – 2018 sebagai bagian integral RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018, mengembangkan visi yang mengacu pada tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 tahun 2008 dan revisi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa tugas pokok dan fungsi Bakesbangpoldagri adalah sebagai berikut :

Tugas pokok:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 ” Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter, Toleran dan Berbudaya untuk Memantapkan Stabilitas Keamanan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Visi ini merupakan pandangan, harapan dan arahan atas kondisi yang ingin dicapai kedepan. Visi ini kemudian dituangkan dalam misi sebagai berikut :

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 :

1. Membangun kebersamaan dan silaturahmi serta solidaritas sosial sehari-hari, sebagai perwujudan rasa persatuan dan kesatuan;
2. Membangun upaya dialogis dan kebebasan berpendapat untuk memecahkan setiap masalah dalam rangka keutuhan masyarakat;
3. Mendorong peran serta dan partisipasi politik masyarakat dalam rangka membangun dan mewujudkan demokratisasi politik;

B. INDIKATOR KINERJA YANG INGIN DICAPAI

1. Menegakkan supremasi hukum, pemerintah yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah :
 - Pemantapan rasa aman dan tertib hukum;
 - Percepatan penanggulangan korupsi;
 - Penataan birokrasi pemerintah daerah;
 - Pemantapan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 - Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah;

2. Pengembangan masyarakat madani, berahlak mulia, berbudaya, menghormati pluraritas dan kesetaraan gender :
 - Pengembangan kepeloporan pemuda;
 - Pemantapan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama;
 - Penguatan ketahanan budaya.

C. INDIKATOR RPJMD DAN RENSTRA SERTA RENJA SKPD

RPJMD			RENSTRA			RENJA 2014		
Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja
1. Kematian akibat konflik dan tindak kekerasan.	Kasus	Menurun menjadi 2	1. Terbangun dan tetap eksisnya kehidupan kolektif dalam perbedaan dan dalam menghadapi dinamika perubahan.	Orang	750 (Toga,Toma Toda, RT/ RW, Aparat, Dosen, Mahasiswa dan Siswa)	1.Terbangun dan tetap eksisnya kehidupan kolektif dalam perbedaan dan dalam menghadapi dinamika perubahan.	Orang	150
			2. Terbangun dan tetap terpeliharanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.	Orang	850 (Toga,Toma Toda, Todat Linmas, Menwa, Kades/ Lurah, Aparat)	2.Terbangun dan tetap terpeliharanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.	Orang	150
			3. Tercapainya situasi yang kondusif bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas/fungsinya.	Orang	750 (Linmas, ORARI, RAPI, Toma Aparat, Kades/ Lurah)	3. Tercapainya situasi yang kondusif bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas/fungsinya.	orang	150
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik.	%	100	1. Meningkatnya kualitas organisasi sosial politik dalam pendidikan politik masyarakat.	Orang	1.250 (Orpol, Ormas, LSM Lembaga Nirlaba)	1. Meningkatnya kualitas organisasi sosial politik dalam pendidikan politik masyarakat.	Orang	250

D. TUJUAN

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan daya tahan dan daya tangkal masyarakat dari akses negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh globalisasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan penegakan hukum;
5. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

E. SASARAN

1. Terwujudnya masyarakat agamis, berbudaya dan bersusila;
2. Terwujudnya sistem kehidupan kolektif dalam perbedaan;
3. Terwujudnya interaksi dan integritas kehidupan secara demokratis;
4. Tercegahnya dan terlindunginya masyarakat dari kejahatan premanisme dalam rangka menciptakan rasa aman dan tertib;
5. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum;
6. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

BAB IV

PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Pada Tahun Anggaran 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat anggaran APBD Rp. 14.619.865.018,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.448.401.418,-
- Belanja Langsung : Rp. 10.171.463.600,-

Pada APBD Perubahan (APBD-P) TA. 2015 terkena rasionalisasi, yaitu pengurangan biaya belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 100.000.000,-. Disisi lain juga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.058.734.882,-. Sehingga pada DPPA Tahun Anggaran 2015, anggaran menjadi Rp. 15.678.599.900,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.507.983.973,-..... Rp. 59.582.555,-
- Belanja Langsung : Rp. 11.170.615.927,-..... Rp. 999.152.327

Sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2015) capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 13.936.349.531 (88,89%) dan realisasi fisik sebesar 99,32 %. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan :

- Tidak terealisasinya dana untuk fasilitasi pengamanan Presiden dan atau wakil Presiden RI sebesar 1 Milyar (6,37%) , dikarenakan tidak jadinya Presiden/dan atau Wakil Presiden RI ke Provinsi NTB.
- Adanya sisa belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 255.007.650,- (1,63%)
- Adanya SILPA dari kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 280.000.000,- (1,78%)
- Adanya efisiensi belanja sebesar Rp. 207.242.719,- (1,33%)

Seandainya biaya fasilitasi kunjungan Presiden/dan atau Wakil Presiden RI tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja keuangan maka realisasi keuangan sebesar Rp. 13.936.349.531 tersebut sama dengan 95,27% (capaian keuangan) dan realisasi fisik 100%.

Secara rinci capaian realisasi dari masing-masing Program dan Kegiatan Belanja Langsung untuk masing-masing Eselon III adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT :

1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- Penyediaan jasa surat menyurat, berupa belanja perangkat dan biaya pengiriman dan belanja surat kabar/media massa. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 20.460.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.20.460.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, terdiri dari belanja jasa telepon, pulsa sms center, belanja jasa air, listrik dan belanja hosting website Bakesbangpoldagri Prov. NTB. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 88.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 58.963.918 (67%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan, berupa honorarium Pengelola Keuangan, Manajemen Aset dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 64.552.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.64.552.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, berupa honorarium cleaning service dan penjaga malam (6 orang). Kegiatan ini terlaksana dengan anggaran sebesar Rp. 87.120.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 87.120.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyediaan alat tulis kantor, didukung dengan anggaran sebesar Rp.66.948.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 66.948.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, berupa belanja bahan publikasi/dokumentasi, serta belanja cetak dan penggandaan. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 25.711.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 25.711.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, berupa layanan informasi/ iklan kepada masyarakat dan pembuatan iklan video. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyediaan makanan dan minuman, terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat serta belanja makanan dan minuman tamu. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 99.500.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 99.457.925 (99,96%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yang terdiri dari :

- **Rapat Kerja Kesbangpoldagri Prov. NTB dengan Kesbangpol Kab/Kota se-NTB.**

Rapat kerja ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara Badan Keatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten/Kota se-NTB dengan Badan Keatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB TA. 2016 sehingga tercipta persamaan persepsi dalam pencapaian tujuan.

Rapat kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Maret 2015 bertempat di Hotel Griya Asri Mataram dan dihadiri oleh 30 orang Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/kota se-NTB ditambah dengan peserta dari Provinsi.

Rapat Koordinasi di buka oleh Sekretaris Bakesbangpoldagri daqn dilanjutkan penyampaian materi oleh Kepala Bappeda

Provinsi NTB, dan Bidang-Bidang Teknis di Bakesbangpoldagri Prov. NTB.

Pelaksanaan Rapat Kerja berlangsung lancar dan tertib sesuai rencana serta menghasilkan kesepakatan agar pelaksanaan Rapat Kerja berikutnya tetap dilaksanakan tetapi lokasi pelaksanaan bergilir dari masing-masing Kabupaten/Kota.

- Rapat Koordinasi stabilitas keamanan menjelang pemilukada, telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 November 2015 bertempat di Grand Legi Hotel Mataram.

Rapat Kerja ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Prov. NTB, para Bupati/Walikota se-Prov. NTB, jajaran Forkopimda Kab/Kota se-NTB, Kepala Badan/Kantor Bakesbangpoldagri Kab/Kota se- Prov. NTB, Ketua /Pimpinan Organisasi Politik, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dll.

Rakor diawali dengan pembukaan dan penyampaian sambutan oleh Bapak wakil Gubernur Prov. NTB yang dilanjutkan dengan Talk Show dari masing-masing Narasumber (KAPOLDA, KAJATI, KETUA PENGADILAN TINGGI, DANREM 162 WB DAN KETUA KPU PROV. NTB) yang dipandu langsung oleh Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB.

Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta yang diawali sendiri oleh moderator (Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB) yang ditujukan kepada seluruh narasumber.

Suasana diskusi berlangsung tertib dan lancar. Peserta terpuaskan dengan tanggapan balik dari narasumber yang dapat memberi sinyal bahwa pelaksanaan pemilukada serentak di NTB akan berlangsung damai dan lancar, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan Rakorpun berlangsung sesuai yang diharapkan.

- **Rapat Kerja (Raker) dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 November 2015 bertempat di Puri Indah Hotel.**

Acara Raker dihadiri 30 peserta yaitu seluruh Kepala Badan/Kantor Bakesbangpoldagri Kab/Kota se- Prov. NTB ditambah dengan peserta dari Provinsi.

Acara Raker dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB. Pada sambutannya Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh peserta rapat bahwa saat sekarang negara kita umumnya dan NTB khususnya sedang dihadapakan pada kondisi dimana aliran yang mengatasnamakan agama muncul dan tumbuh di lingkungan masyarakat. Kekerasan fisik maupun seksual juga marak terjadi yang membawa dampak pada instabilitas daerah. Pengikut ISIS bukan tidak mungkin ada yang berasal dari daerah kita. Oleh karena itu Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB menghimbau agar kita selaku aparat untuk jeli dan peka untuk melihat perkembangan yang ada. Berkaryalah dalam program dan kegiatan yang dapat menangkal situasi-situasi negatif yang terjadi, cegah dini dan deteksi dini terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi harus dimiliki sehingga bibit munculnya konflik dapat ditekan. Acara Raker dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber yang berasal dari Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Karim Marasabessy, S.Pi, M.Si dan Kepala Bidang-Kepala Bidang Teknis Lingkup Bakesbangpoldagri Prov. NTB dan diskusi. Secara keseluruhan pelaksanaan Raker berlangsung tertib dan lancar.

- Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi ke Kab/Kota se NTB serta perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program/kegiatan ke Jakarta dan Provinsi lainnya.

Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 634.558.427. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 622.791.800 (98,15%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Kantor:

- Pengadaan peralatan gedung kantor, berupa pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan yaitu pengadaan mobil roda empat sebanyak 3 unit, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer unit jaringan, pengadaan personal komputer, pengadaan peralatan personal komputer (printer), pembangunan sistem aplikasi data dan informasi ormas/ LSM, pengadaan peralatan studio visual (kamera 15mp). Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 801.979.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 788.938.400 (98,12%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, berupa belanja renovasi kantor sementara dan pembangunan gedung kantor. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 2.114.390.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.831.118.000 (86,60%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, berupa belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pergantian suku cadang, rekondisi kendaraan dinas roda empat, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja surat tanda nomor kendaraan, dan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kepentingan pindah kantor sementara. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 188.350.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 183.609.554 (97,48%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, berupa belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 30.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur, berupa belanja pemeliharaan/perbaikan meja dan kursi. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 10.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, berupa belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor dan pengadaan listrik kantor sementara. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 14.500.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 9.954.085 (68,65%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Pendidikan dan pelatihan formal, berupa belanja kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas berbahasa inggris bagi 5 (lima) orang pegawai Bakesbangpoldagri. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 24.122.500. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 17.050.000 (70,68%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Pembinaan mental dan fisik aparatur, berupa belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam dan belanja makan minum kegiatan imtaq. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 11.250.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 8.250.000 (73.33%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, berupa honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 13.150.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 13.150.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyusunan rencana kinerja SKPD, berupa honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPPA, Rencana Kinerja (Renja) dan honor Administrator Website. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 45.325.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.45.325.000 (100%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. BIDANG PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS DAN PENANGANAN KONFLIK :

2.1. Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan 1(satu) kegiatan utama yaitu:

- Pengendalian keamanan lingkungan, dengan sub kegiatan antara lain:
 - **Fasilitasi Tim koordinasi pembinaan penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bergerak luas, sistematis, sensitif, dan strategis di Prov. NTB,**
Merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No. 460-261.
Tugas tim tersebut adalah melakukan penggalangan dan sosialisasi, melakukan idenifikasi dan pencegahan gangguan keamanan, mengambil langkah antisipasi, meminimalisasi,

serta merumuskan kebijakan yang diperlukan terkait stabilitas daerah.

Tim ini setiap bulan melakukan koordinasi guna membahas isu-isu yang berkembang baik di level nasional maupun internasional dan lebih khusus lagi yaitu membahas/menangkal isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat NTB agar segera diinisiasi penyelesaian supaya tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar atau mengantisipasi supaya isu yang berkembang di luar wilayah NTB tidak mengganggu stabilitas keamanan di wilayah NTB. Fasilitasi terhadap Tim ini telah terealisasi kepada Tujuh belas orang anggota tim selama 12 bulan.

- **Rapat Evaluasi Tim terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial.**

Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah melalui pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial. Pelaksanaan rapat berlangsung pada hari Rabu s/d Kamis, tanggal 5 s/d 6 Agustus 2015 bertempat di Hotel Grand Legi, Jl. Sriwijaya Nomor 81 Mataram yang diikuti oleh unsur tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi yang berjumlah 50 (lima puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggota Tim Terpadu Dinas/Instansi Provinsi : 10 org
2. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota se NTB : 10 org
3. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota : 10 org
4. Kabid pada Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota : 10 org
5. Kabag Ops Polres Kabupaten/Kota : 10 org

Acara rapat evaluasi dibuka secara langsung oleh Bapak sekretaris Daerah Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan pengarahan dan penyampaian materi oleh narasumber. Pada sesi berikutnya acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh peserta kepada narasumber. Disamping itu terjadi pula sharing pengalaman dari masing-masing peserta terkait

dengan pengalaman dan pengamatan riilnya dilapangan. Secara keseluruhan acara rapat evaluasi berlangsung tertib dan lancar.

- **Pelatihan verifikator dan penyusunan Laporan Timdu dalam rangka penanganan konflik sosial,**

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 September 2015 di Hotel Grand Legi Mataram. Peserta yang ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut yaitu wakil dari masing-masing Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se-NTB dan instansi terkait dengan total peserta sebanyak 35 orang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang sistem pelaporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga optimalisasi dalam penyampaian laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi secara periodik dan insidensi dapat tercapai,

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan sekaligus penyampaian sambutan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB diantaranya:

1. Kepada seluruh Kabupaten/Kota agar segera menyesuaikan nomenklatur Tim Terpadu dan Rencana Aksi yang semula bernama Tim terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri menjadi Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial.
2. Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial segera diimplementasikan khususnya dalam melaporkan secara periodik B.04, B.08, B.12

- **Rakorda Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,**

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun

2015 ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini dalam menangkal Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2015 dilaksanakan selama 2 (Dua) hari pada tanggal 11 sd 13 Mei 2015 di Hotel Golden Palace Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram yang diikuti oleh Pejabat Kesbangpoldagri Kab/Kota se NTB, Ketua dan Sekretaris FKDM Kab/Kota se NTB serta Pengurus FKDM Provinsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Orang Peserta, dengan rincian sbb:

- | | |
|--|----------|
| a. Pengurus FKDM Provinsi NTB | 25 Orang |
| b. Pengurus FKDM Kab/Kota se NTB | 20 Orang |
| c. Pejabat Bakesbangpoldagri Kab/Kota se NTB | 30 Orang |

Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB ini dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi NTB dan dilanjutkan penyampaian materi oleh beberapa Narasumber yaitu :

- a. Kapolda NTB dengan materi berjudul “Deteksi Dini Dan Cegah Dini Kerawanan di Tengah Masyarakat”
- b. Danrem 162 / WB dengan materi berjudul “Peran TNI Dalam Menjaga Stabilitas Daerah”
- c. Kabinda NTB dengan materi berjudul “Dasar – dasar Intelijen dan Pengumpulan Keterangan”
- d. Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan materi berjudul “Peran Kesbangpoldagri Dalam Menciptakan Stabilitas di Daerah”
- e. Ketua FKDM NTB dengan materi berjudul “Evaluasi dan Penguatan Fungsi FKDM”

Setelah selesai pemaparan dari masing-masing Narasumber acara dilanjutkan dengan diskusi. Karena materi yang disampaikan sangat menarik dan sering ditemukan dilapangan, maka diskusi berlangsung aktif dan dinamis.

Secara keseluruhan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2015 berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Mencermati laporan dan masukan dari Kab/Kota terkait perkembangan situasi dan kondisi Ketertiban dan Keamanan terakhir di Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari peserta kabupaten/kota, maka langkah-langkah penguatan kelembagaan FKDM yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Kerja Tahunan FKDM dengan dukungan anggaran yang cukup melalui Kesbangpol masing-masing daerah.
- b. Membuat dan Menyepakati Logo FKDM Provinsi, Kab/Kota;
- c. Melakukan konsolidasi dan koordinasi penguatan FKDM pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa se-Kabupaten/Kota se-NTB;
- d. Memperbaharui kepengurusan FKDM Kab/Kota se-NTB dan menerbitkan Surat Keputusan baru;
- e. Menyepakati beberapa poin yang menjadi Rekomendasi bersama.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan di dalam penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2015 agar dilaksanakan secara maksimal, diantaranya:

1. Sinergitas dan koordinasi yang harmonis antara Pengurus FKDM Provinsi NTB dengan Pengurus FKDM Kab/Kota dengan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah, karena

- kesuksesan pembangunan di berbagai bidang sangat di tentukan oleh keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah di harapkan dapat membentuk FKDM tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 3. Terciptanya sinergitas antara FKDM dengan Pemerintah, FKDM dengan Forum lain yang ada di masyarakat dalam menjaga ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah.

- **Temu bina pencegahan konflik dikalangan pemuda dan ormas;**

Merupakan suatu bentuk kegiatan dengan maksud :

- Memberikan pengetahuan, menyamakan persepsi dan pola pikir tentang pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat melalui gerakan bersama forum atau kelompok pengajian yang ada di masyarakat.
- Memaksimalkan peran mahasiswa, pelajar dan kelompok pengajian dalam mencegah lebih dini terhadap gejolak yang terjadi.
- Mencari titik temu langkah pendekatan keimanan dengan metode Al-Quran dan Hadist dalam penyelesaian konflik dan meredam isu-isu provokasi, menghasut yang dpat memecah kerukunan hidup masyarakat.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu :

- Membangun komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat , pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah , pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan konflik, penghentian kekerasan konflik dan terorisme serta pemulihan konflik yang akan, sedang, maupun yang sudah terjadi
- Menjadikan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai mitra utama pemerintah sebagai perekat kelompok, pemersatu, pengayom, pencegah konflik dan

mediator dalam menjembatani penyelesaian konflik dimasyarakat.

- Memberi ruang kepada Mahasiswa, pelajar, LSM, kelompok agama guna berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 29 september 2015 bertempat di Aula Ponpes Darul Maqrif Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

- **Fasilitasi/ pengerahan personil terlatih dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden, dan pemulihan/ penghentian konflik sosial;**

Secara prosedur tetap (Protap) pengamanan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI ke daerah-daerah adalah menjadi kewenangan TNI danPOLRI. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan pengamanan tersebut terindikasi akan membutuhkan belanja/ pengeluaran yang lebih besar maka pihak TNI dan POLRI dapat mengajukan proposal untuk mendapat tambahan anggaran dari Bakesbangpoldagri sesuai yang dibutuhkan. Tetapi karena sampai dengan akhir Desember 2015 pihak TNI dan POLRI tidak melakukan pengajuan proposal untuk mendapat tambahan anggaran kepada Bakesbangpoldagri maka anggaran Fasilitasi/ pengerahan personil terlatih dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke NTB tidak terealisasi, atau realisasi keuangan 0%. Anggaran yang tidak terealisasi telah dikembalikan ke Kas Daerah.

- **Belanja sosial operasional penyusupan/ elistasi jejaring deckin FKDM.** Merupakan dukungan biaya yang diberikan kepada petugas-petugas yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melakukan penyusupan atau menyamar dalam rangka menggali dan atau mencari informasi ke lokasi/wilayah/orang/kumpulan orang-orang

yang dicurigai akan mengganggu atau merusak tatanan demokrasi dan keamanan/kenyamanan didaerah.

Dukungan anggaran untuk memenuhi program dan kegiatan ini yaitu sebesar Rp 4.456.318.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.424.781.932 (76,85%), sedangkan realisasi fisik mencapai 93,63%.

3. BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN:

3.1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan:

Berbagai kondisi riil yang terjadi di Indonesia saat ini yang menjadi dasar pemikiran perlunya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan adalah sebagai berikut :

- Penurunan rasa nasionalisme dan lemahnya rasa kebangsaan para komponen bangsa, termasuk anak didik kita sehingga ada yang tidak mampu menyebutkan teks Pancasila secara utuh dan benar
- Rasa apriori terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga banyak para siswa lebih mengidolakan tokoh fiksi dan selebritis dari pada tokoh nasional bangsa ini
- Maraknya perkelahian antar pemuda, pelajar, mahasiswa yang dipicu oleh masalah-masalah sepele
- Dekadensi moral yang disebabkan pengaruh globalisasi, dll.

Ini semua merupakan bentuk dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang ada didepan mata kita. Oleh karena itu peningkatan pemahaman akan wawasan kebangsaan dan penguatan rasa nasionalisme perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya termasuk kepada para pendidik sebagai ujung tombak yang memberi kontribusi besar dalam pembentukan karakter bangsa, oleh sebab itu maka Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memprogramkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan upaya menghadapi kondisi tersebut diatas, dan berikut ini kami laporkan sebagai berikut :

➤ Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, berupa :

- Honorarium Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM), yaitu fasilitasi yang diberikan kepada 20 orang yang ditetapkan sebagai pengurus PAKEM di Provinsi NTB.

- Rakor dan silaturahmi Toga, Toma, Todat dan FKUB dalam rangka peningkatan kehidupan beragama,

Kegiatan Rakor dan silaturahmi Toga, Toma Todat dan FKUB dalam rangka peningkatan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara telah terselenggara atas kerjasama Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan Bakesbangpol Linmas Kabupaten Bima pada tanggal 22 – 23 April 2015 di Hotel Lila Graha Bima yang diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Generasi Muda dan FKUB se-Kabupaten Bima.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB yang dilanjutkan penyampaian materi atau pencerahan dari narasumber Kapolres Kabupaten Bima, Ketua FKUB Prov NTB dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bima. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta kepada seluruh narasumber. Secara keseluruhan acara berlangsung tertib , dinamis dan lancar.

- Perjalanan Dinas dalam daerah kepada Tokoh Masyarakat (Dai) ke Kab/Kota.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta harrmonisasi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama para Tokoh Agama/Da'i (Ketua MUI, Ketua FKUB) telah melakukan kunjungan ke masjid-masjid secara

bergantian dan melakukan siaturrahmi dan dialog keagamaan dengan masyarakat (jama'ah sholat) dan ini merupakan salah satu cara dari Bakesbangpoldagri untuk mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat terkait berbagai macam permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, disamping itu juga dilakukan fasilitasi Da'i-Da'i tersebut untuk mendatangi wilayah-wilayah yang rawan konflik atau ditengarai terdapat anggota/kelompok masyarakat yang berpotensi akan memicu ketidaknyamanan masyarakat sekitar untuk memberikan pencerahan dan berdakwah melalui forum khutbah Jumat.

Secara keseluruhan dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 456.815.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 439.592.161 (96,23%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

➤ Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, berupa :

- Rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

Rakor Forum Pembauran Kebangsaan telah dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 20 – 21 Mei 2015 bertempat di Fave Hotel Mataram. Acara Rakor diikuti oleh 37 orang peserta dari unsur Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi NTB dan instansi terkait. Acara Rakor di buka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Narasumber yang terdiri dari Kapolda NTB, Kakanwil Kemeterian Agama Prov. NTB dan Ketua FPK Prov. NTB.

Dari Rakor tersebut dihasilkan beberapa point :

- Forum ini merupakan wahana untuk membahas langkah dalam menanggulangi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya dalam hal suku, ras, agama, etnis dan budaya sehingga tercipta suasana nyaman, tentram

dan mendukung program pemerintah terutama menjelang Pemilu serentak yang dilaksanakan pada Desember 2015

- Tingkatkan kewaspadaan dini dari segala bentuk gerakan dan aktivitas yang dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok yang berperilaku tidak lazim
- Orientasi Bela Negara Kewaspadaan Nasional bagi Siswa-Siswi SMA/MA/SMK se Prov. NTB, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara/komponen bangsa, khususnya bagi siswa/siswi SMA/MA/SMK guna mewujudkan ketahanan bangsa di dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI.

Tujuannya adalah untuk mendorong tumbuhnya rasa kesadaran bela negara bagi siswa/siswi SMA/MA/SMK ditengah-tengah kemajuan teknologi dan peradaban manusia di era globalisasi ini sehingga tidak tergerus karakternya sebagai anak bangsa dan tetap menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsadan bernegara yang selalu memiliki jati diri dan karakter sebagai anak Indonesia.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama dua hari yaitu dari tanggal 12 s.d 13 Mei 2015 bertempat di Fave Hotel Mataram. Kegiatan Orientasi Bela Negara Kewaspadaan Nasional bagi siswa-siswi SMA/MA/SMK se Prov. NTB ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beberapa orang narasumber yang merupakan perwakilan dari :

- POLDA NTB
- BKD dan DIKLAT Prov NTB (Widyaiswara).
- KOREM 162 Wira Bhakti
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan diskusi. Acara diskusi berlangsung aktif dan dinamis, karena

materi yang disampaikan cukup realistis dan sesuai dengan daya pikir dan psikologis siswa/siswi saat itu. Banyak diantara peserta yang menyampaikan realita dalam kesehariannya yang ingin dicarikan benang merahnya apakah kelakuan mereka sudah menunjukkan warga negara yang baik atau sudah memenuhi kriteria memiliki wawasan kebangsaan, dll. Melihat kondisi dan antusias peserta diharapkan agar pada tahun-tahun berikutnya pelaksanaan orientasi bela negara agar tetap diprogramkan dengan volume kegiatan yang lebih besar lagi.

- Labsite Sosial dalam rangka pengkajian/ penelitian Kampung Madani kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Lainnya.

Sub kegiatan ini merupakan suatu bentuk inovasi dalam rangka penguatan ketahanan sosial bagi masyarakat dimana pada lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut akan terdapat kegiatan pembangunan berskala Nasional/ Internasional apabila tidak dilakukan penataan kehidupan masyarakat sejak dini dikhawatirkan akan mengakibatkan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu pula Labsite Kampung Madani ini merupakan suatu bentuk/model kampung yang dihuni oleh masyarakat yang berlatar belakang suku, agama pendidikan, ekonomi, dll yang berbeda akan tetapi memiliki Ikatan Sosial dan Rasa Nasionalisme yang tinggi, sehingga apapun bentuk perubahan yang terjadi mereka terbuka untuk menerimanya tetapi tidak melunturkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki.

Tahun 2015 merupakan tahun penjajakan/survey untuk menentukan lokasi sebagai Pilot Project Kampung Madani dengan melakukan pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam upaya pendalaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan sumber daya yang dimiliki dari

rencana lokasi yang akan dipilih. Dari hasil penjajagan tersebut ditetapkanlah 4 (empat) Lokasi yang terdiri dari :

- Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dimana di wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang merupakan lokasi akan dibangunnya berbagai macam fasilitas pariwisata/resort.
- Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dimana dilokasi ini direncanakan akan dibangun mega proyek Global Hub (bandar/pelabuhan) Internasional setara dengan pelabuhan di Singapore.
- Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan kawasan lingkaran tambang PT. Newmont Nusa Tenggara dimana kehidupan yang heterogen akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, lokasi ini telah ditetapkan sebagai Kawasan SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora) dan juga di daerah tersebut saat ini telah dilaksanakan pembangunan Pabrik Gula PT.PMS.

Secara keseluruhan dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 565.934.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 537.867.586 (95,04%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

➤ Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, berupa :

- **Penyusunan TOR Buku Biografi Tokoh-Tokoh Daerah NTB;**

Merupakan suatu bentuk inovasi dalam rangka untuk menghargai dan mengenang perjuangan dan kiprah para Tokoh-Tokoh Daerah dalam memimpin dan memperjuangkan kemajuan daerahnya, disamping itu juga

dimaksudkan sebagai upaya menjadi Inspirasi dan Referensi bagi generasi muda untuk dapat mencontoh semangat juang dari tokoh-tokoh dimaksud. Pada tahun ini merupakan tahap penyusunan Term Of Reference (TOR) yaitu yang mengupas tentang bagaimana teknik/sistematika penulisan, teknik pengumpulan data maupun penentuan tugas masing-masing tim.

- **Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);**

Dalam upaya membentuk unit-unit PPWK di berbagai institusi yang merupakan anggota dari PPWK tersebut untuk menyebarluaskan pemahaman terkait dengan Wawasan Kebangsaan.

- **TOT untuk 4 (empat) Konsensus Dasar NKRI bagi tenaga pendidik/guru se Prov. NTB;**

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk upaya berkesinambungan dari Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpoldagri Prov. NTB untuk dapat menciptakan tenaga pendidikan yang koncern disamping memberikan materi ajar sesuai dengan bidangnya juga dapat menyelipkan materi ajar yang berkaitan dengan kegiatan yang menanamkan rasa Nasionalisme dengan peningkatan rasa wawasan kebangsaan yang tidak keluar dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menanamkan sendi-sendi dasar karakter bangsa dalam kehidupan yang tetap mengakar pada nilai-nilai kearifan lokal (Lokal Widsom) demi terciptanya ketahanan Nasional dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TOT tentang 4 (empat) konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi tenaga pendidik telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Agustus 2015 bertempat di Hotel Golden Palace Jl. Sriwijaya No. 125 Mataram yang

dihadiri oleh 50 orang perwakilan dari Guru SD, SLTP, SLTA se Prov. NTB.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Prov. NTB sekaligus sebagai narasumber dengan materi berjudul " Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik dalam Menanamkan Pemahaman 4 (empat) Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Setelah pembukaan dan penyampaian materi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Prov. NTB, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi secara pleno oleh narasumber yang lain yaitu :

- KOREM 162/WB dengan materi berjudul Memahami 4 konsensus dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Upaya Mempertahankan Disintegrasi Bangsa
- BKD dan Diklat dengan materi berjudul Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa bagi Aparatur Sipil Negara
- Institut agama Islam Negeri dengan Materi " Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Perikat Anak Bangsa di tengah-tengah situasi Perpolitikan Saat Ini
- DIKPORA, dengan materi " Penerapan dan Pemahaman Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Menghadapi Era Globalisasi Pada Anak Didik.

Pelaksanaan acara berlangsung tertib, aktif dan dinamis, hal ini dapat dilihat pada acara diskusi yang awalnya hanya dibuka 3 sesi, tetapi karena antusiasme para pendidik menyampaikan saran, pendapat, pertanyaan serta sharing pengalaman sehingga acara diskusi berlangsung sampai 6 sesi. Pada acara diskusi dan sharing pengalaman tersebut banyak dari peserta (pendidik) menyampaikan pengalaman

lansung mereka dalam menghadapi berbagai karakter anak didiknya. Disamping itu pula banyak yang menyuarakan tentang kisah pilu para pendidik di era sekarang yang selalu berhadapan dengan HAM dan orang tua peserta didik yang terlalu mengagungkan HAM sehingga kejadian-kejadian kecil di sekolah dalam rangka pembinaan disiplin, dan pembentukan karakter anak didik seringkali dibenturkan dengan HAM, dan tidak jarang berujung pada urusan hukum.

Terhadap kondisi tersebut banyak menyarankan agar tidak hanya saat ini dilakukan TOT tersebut, tetapi harus terus dilakukan dengan peserta yang variatif termasuk dari kalangan orang tua peserta didik dengan tema peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa .

- **Outbound bela negara bagi generasi muda dan atau pramuka;**

Outbound bela negara telah dilaksanakan di Teratai Outbound Taman Wisata Alam Suranadi Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 26 Nopember 2015 yang diikuti oleh 100 orang peserta dari unsur generasi muda dan pramuka.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan jiwa disiplin dan motivasi kerja bagi generasi muda dan/atau pramuka dalam memahai peraturan perundang-undangan, memahami kode etik, dan memahami seluruh tugas dan fungsi guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tujuan yang diharapkan adalah peserta memupuk disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimanapun dan apapun. Disamping itu juga peserta diharapkan memahami wawasan kebangsaan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kegiatan Outbound dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Prov. NTB dan pemateri wawasan kebangsaan dari KOREM 162/WB serta

dalam pembelajaran Uotbound di pandu langsung oleh Tim Teratai Outbound.

Dukungan anggaran untuk memenuhi seluruh rangkaian kegiatan diatas (Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa) yaitu sebesar Rp 235.836.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 234.218.321 (99,31%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

4. BIDANG PENGEMBANGAN POLITIK DAN FASILITASI ORPOL/ORMAS :

4.1. Program Pendidikan Politik Masyarakat :

➤ Penyuluhan kepada masyarakat, berupa:

- **Tim kajian dan analisa parameter Indeks Demokrasi Daerah,**
- **Rapat Koordinasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia;**

IDI merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi. Alat ini sengaja dirancang dan sensitif dengan naik turun dinamika demokrasi. “Karena IDI disusun berdasarkan pada kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi dari realitas yang ada”.

Perkembangan IDI NTB dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi. Tingkat demokrasi di NTB berdasarkan penghitungan indeks mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2014, sehingga NTB masuk dalam kategori sedang.

Angka IDI merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek. Yakni, angka kebebasan sipil dengan nilai sekitar 53,75, aspek hak politik dengan nilai sekitar 62,08, dan aspek lembaga demokrasi dengan nilai sekitar 68,38.

Kenaikan nilai IDI di NTB terutama didorong oleh kenaikan aspek hak-hak politik di tahun 2014 cukup signifikan.

Praktis, nilai aspek ini beranjak ke posisi sedang, sebelumnya berada di nilai rendah.

Dari sisi indikator, ada 14 aspek yang mengalami kinerja baik. Misalnya, hak dipilih dan memilih, peran birokrasi pemerintah daerah, peran partai politik. Berikutnya, kebebasan berpendapat dan lainnya sebagaimana dengan peroleh skor diatas 50. Sedangkan, indikator yang berada di bawah skor 50, diantaranya, persentase perempuan terpilih sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, aturan tertulis yang membatasi kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. “Pada prinsipnya, indeks demokrasi di NTB berada pada posisi sedang,”

- **Sarasehan Orsospolbud;**

Kegiatan Sarasehan Organisasi Sosial politik dan Budaya (Orsospolbud) dimaksudkan sebagai upaya penyiapan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya pemantapan sikap dan perilaku masyarakat dalam kerangka pengembangan budaya bernegara dan berbangsa. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang konkrit terhadap pemahaman yang keliru bidang budaya melalui penuangan ide secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sistem dialog dan diskusi yang baik, yang berkualitas serta bermoral dengan mengedepankan azas demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Sarasehan Organisasi Sosial politik dan Budaya telah dilaksanakan pada Tanggal 13 Oktober 2015 di Hotel Pratama Jl. Adi Sucipto No. 10 Mataram yang diikuti peserta dari unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan serta instansi terkait dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Acara diawali dengan pembukaan sekaligus penyampaian materi Pengantar Tradisi Midang Adat Sasak oleh Kepala

Bakesbang Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan penyampaian materi secara pleno dari narasumber yang lain yaitu:

1. DR. Hj. Warni Juita dengan materi Merari
2. Kasmianti dengan materi Filosofi Midang
3. DR. Siti Sanisah

Pelaksanaan acara berlangsung aktif dan dinamis karena materi serta teknik penyampaian yang dilakukan narasumber cukup menarik dan merupakan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat suku Sasak (Pulau Lombok), sehingga pada saat acara diskusi / tanya jawab banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan lebih mendalam dari peserta. Kesimpulan dari pelaksanaan acara sarasehan tersebut guna tetap menghidupkan dan melestarikan budaya dan tradisi serta kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah, disarankan agar kegiatan yang sama dilaksanakan juga untuk daerah di Pulau Sumbawa dengan tradisi adat Samawa dan Mbojo.

- **Bimtek kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM;**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah upaya pemantapan situasi dan kondisi sosial dan psikologi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai upaya penyiapan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya pemantapan sikap dan perilaku masyarakat dalam kerangka pengembangan budaya bernegara dan berbangsa.

Sedangkan tujuannya adalah melanjutkan proses pendewasaan khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui perkembangan secara optimal sistem pembinaan Ormas/LSM yang baik, yang berkualitas dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Bimtek Kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM telah dilaksanakan pada Tanggal 28 s.d 30 Mei 2015 bertempat di

Hotel Golden Palace Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dengan peserta berasal dari unsur Partai Politik, Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se NTB berjumlah 50 orang.

Acara diawali dengan pembukaan sekaligus penyampaian materi Kebijakan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilanjutkan secara pleno oleh narasumber yang lain yaitu:

1. Ketua KPU Provinsi NTB dengan materi Autentifikasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Sesuai Hasil Pemilu
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB dengan materi Tata Cara Penerimaan Dana Bantuan keuangan Partai Politik.
3. BPK RI Perwakilan NTB dengan judul materi Bentuk Baku Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Kasubbid. Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan materi berjudul Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2014

Pelaksanaan acara berlangsung aktif dan dinamis karena materi serta teknik penyampaian yang dilakukan narasumber cukup menarik dan merupakan bentuk nyata untuk diimplementasikan oleh Orpol dan Ormas dalam manage/ mengelola keberlanjutan roda organisasi/ lembaganya. Karena inti dari pertemuan ini merupakan fasilitasi dalam bentuk bantuan keuangan, peserta yang hadir sangat antusias menyimak dan memperhatikan secara detail materi dan arahan yang disampaikan narasumber, sehingga pada saat acara diskusi/ tanya jawab peserta menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk bertanya secara detail tentang pengelolaan keuangan orpol/ormas. Kesimpulan dari pelaksanaan acara Bimtek Kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM sangat bermanfaat untuk

mendisiplinkan sistem administrasi maupun keuangan Orpol/Ormas dan LSM yang ada di Prov. NTB. Karena terbatasnya peserta yang diundang diharapkan kedepannya kegiatan yang sama agar tetap dilaksanakan dengan menghadirkan peserta dari Ormas/LSM yang lain yang belum sempat dihadirkan pada pertemuan tahun ini.

- **Peningkatan kapasitas dan partisipasi Ormas/LSM dalam pembangunan;**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan/pemantapan situasi dan kondisi sosial dan psikologi Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai langkah terobosan dalam penyiapan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya pemantapan sikap dan perilaku masyarakat dalam kerangka pengembangan budaya bernegara dan berbangsa.

Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu Untuk melanjutkan proses pendewasaan khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui perkembangan secara optimal sistem pembinaan Ormas/LSM yang baik, yang berkualitas dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tanggal 20 Maret 2015 bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Kabupaten Bima dengan dihadiri oleh peserta dari unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bima

Kegiatan diawali dengan pembukaan secara resmi yang dilakukan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bima yang dilanjutkan dengan penyampaian materi secara pleno dari 4 (empat) Narasumber yang terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan materi berjudul Peran Pemerintah Dalam

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Bima dengan materi berjudul Sosialisasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Kepolisian di Kabupaten Bima dengan materi berjudul Kebijakan Daerah terkait dengan Ormas/LSM
4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Ormas/LSM dengan materi berjudul Langkah dan Upaya Pembinaan Ormas/LSM

- Kegiatan koordinasi/persiapan/pelaksanaan dan pasca pemilukada.

Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 811.469.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 780.195.008,- (96,15%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 97,54%.

- Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, berupa pemberian bantuan hibah keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik (parpol). Pemberian bantuan/hibah keuangan ini dilaksanakan atas dasar ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pemberian bantuan/hibah keuangan partai politik ini dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi NTB selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atas rekomendasi berupa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Kepala Bidang Pengembangan Politik dan fasilitasi Orpol/Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Prov. NTB selaku SKPD yang memiliki fungsi dan

kewenangan terhadap keberadaan/legalitas Parpol dan ormas di Provinsi NTB. Pada TA. 2015 berdasarkan perolehan suara di DPR terdapat **11 (sebelas) Partai Politik** yang duduk di DPR dengan total bantuan keuangan sebesar Rp. **1.771.050.919,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)**. Secara rinci parpol-parpol yang memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Nama-nama Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

No.	Nama Parpol	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Nilai Per-Suara (Rp.)	Besarnya Bantuan Keuangan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai NasDem	158.002	3	718,78	113.568.677,56
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	199.626	5	718,78	143.487.176,28
3.	Partai Keadilan Sejahtera	206.414	6	718,78	148.366.254,92
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	216.923	5	718,78	155.919.913,94
5.	Partai Golkar	373.056	11	718,78	268.145.191,68
6.	Partai Gerindra	265.887	8	718,78	191.114.257,86
7.	Partai Demokrat	305.669	8	718,78	219.708.763,82
8.	Partai Amanat Nasional	195.483	5	718,78	140.509.270,74
9.	Partai Persatuan Pembangunan	195.648	6	718,78	140.627.869,44
10.	Partai Hanura	207.550	5	718,78	149.182.789,00
11.	Partai Bulan Bintang	139.710	3	718,78	100.420.753,80
	Jumlah	2.463.968	65		1.771.050.919,04

Sedangkan bantuan kepada Ormas berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Prov. NTB terdapat 39 Ormas yang mendapat hibah keuangan dengan total biaya sebesar Rp. 704.500.000,- (Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sama halnya seperti bantuan keuangan pada Parpol,

bantuan keuangan kepada Ormas juga dilaksanakan oleh Biro Keuangan selaku SKPKD berdasarkan rekomendasi berupa verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Provinsi NTB.

Tabel 4.2. Ormas/LSM/Kelompok MasyarakatPenerimaBantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2015

No.	Nama Ormas	Alamat	Besarnya Bantuan Keuangan (Rp.)
1	2	3	6
1.	Banjar KARYA SATRIA	Karang manggis Lingkungan Karang Lelede	Rp. 5.000.000
2.	Banjar SRI ARTHA YADNYA	Jl. RA Kartini Gang Komodo 1 No. 8 Monjok Geria	Rp. 5.000.000
3.	Banjar SUKA DUKA DHARMA YASA	RT. 07 Link. Kamasan Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Mataram	Rp. 5.000.000
4.	Banjar TARUNA KARYA JATI	Lingkungan Cemara Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang	Rp. 5.000.000
5.	Dharma Pertiwi KOORCAB NTB	Jl. Majapahit No. 10 A Mataram Kec. Kota Mataram	Rp. 5.000.000
6.	Koordinator Wilayah NTB Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	Jl. Adi Sucipto No. 09 Rembiga Kec. Kota Mataram	Rp. 5.000.000
7.	Banjar SUKA DUKA SERUNI	Jl. Cendana III Lingkungan Taman Seruni kel. Taman Sari	Rp. 7.000.000
8.	Banjar SIDE KARYA	Jl. RA. Kartini Monjok Geria Kel. Monjok Kec. Selaparang	Rp. 7.000.000
9.	Lembaga Bina Masyarakat untuk Pembangunan Nusa Tenggara Barat	Jl. Resani Batu Karu Utara Narmada Kec. Lobar	Rp. 7.000.000
10.	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia	Jl. Lingkar Selatan BTN Perum Elit Blok G No. 26 Kec. Kota Mataram	Rp. 7.000.000
11.	Pengurus Daerah Persatuan Wredatama	Jl. Pemuda No. 17 Mataram Kota Mataram	Rp. 7.000.000
12.	LPK ZAKWAN TRAINING CENTER	RT. 02 RW. 01 Link. Pesanggarahan Kel. Kuang Kec. Taliwang Sumbawa Barat	Rp. 7.000.000

Tabel 4.3. Badan/Lembaga Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

No.	Nama Badan	Alamat	Besarnya Bantuan Keuangan (Rp.)
1	2	3	6
1.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB	Jl. Langko No. 17 Mataram	Rp. 1.500.000.000
2.	POLDA NTB	Jl. Langko No. 77 Mataram	Rp. 1.000.000.000
3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB	Jl. Udayana No. 10 Mataram	Rp. 245.179.000
	Jumlah		Rp. 2.745.179.000

- Pemberian bantuan hibah dilakukan oleh Biro Keuangan
 - Tim fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik,
 - Tim verifikasi berkas keuangan parpol.

Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 95.340.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 85.424.000 (89,60%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- Penyusunan Data Base Politik, berupa Penyusunan laporan situasi/ kondisi Politik menjelang/pasca Pemilu. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 18.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.200.000 (90,00%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 90,00%.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, berupa Monitoring keberadaan ormas/LSM. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 140.988.000. Sampai dengan 31 Desember 2015, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 133.694.520 (94,83%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

1. Pelaksanaan kegiatan masih dihadapkan pada kurangnya daya dukung sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai, demikian juga dengan jabatan fungsional seperti arsiparis, perencana dan supir yang belum ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB. Kondisi ini dipersulit lagi dengan terjadinya mutasi tenaga-tenaga potensial ke instansi lain.
2. Adanya tugas-tugas insidentil berupa penanganan konflik horizontal di beberapa Kabupaten/Kota.
3. Anggaran Tim Terpadu (Timdu) terasa kurang memadai untuk mendukung operasional khususnya dalam upaya mengantisipasi berbagai kondisi yang berkembang (cegah dini, tangkal dini).

B. UPAYA PENYELESAIAN

1. Optimalisasi program kegiatan dengan memperhatikan relevansi dan urgensinya.
2. Memacu pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
3. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait sebagai upaya cegah dini dan tangkal dini untuk menjaga stabilitas daerah.

C. REKOMENDASI

1. Pengajuan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga program-program yang dikembangkan dapat memberikan hasil yang optimal.

2. Pengajuan permintaan tenaga staf dan tenaga fungsional yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik pengetahuan/kemampuan kerja maupun integritasnya.
3. Singkatnya waktu penetapan Perubahan anggaran pada akhir tahun dirasakan sangat menghambat jalannya kegiatan, untuk itu jika dimungkinkan waktu penetapam perubahan anggaran dilaksanakan pada awal triwulan III.
4. Faktor kenyamanan lingkungan merupakan daya dukung yang strategis dan vital didalam berbagai sektor pembangunan, untuk itu diperlukan perhatian yang lebih khusus.

D. KESIMPULAN

Pada umumnya program dan kegiatan tahun anggaran 2015 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan walaupun pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan oleh faktor luar, maka koordinasi dengan instansi, lembaga terkait dalam Provinsi, luar Provinsi maupun pemerintah pusat akan terus di tingkatkan.

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat berguna atau sebagai bahan rujukan program/kegiatan dan bahan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Demikian dan terima kasih.

Mataram, 31 Desember 2015

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Drs. LALU BAYU WINDYA M, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610422 198603 1 004

DOKUMENTASI KEGIATAN

BIDANG : PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS & PENANGANAN KONFLIK

1. Rapat Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal Kegiatan: 5 s/d 6 Agustus 2015





2. Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Rakorda FKDM) Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 11 s/d 13 Mei 2015



3. Rapat Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Berdampak Luas, Sistemik, Sensitif, dan Strategis Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 2 September 2015



4. Forum Komunikasi dan Koordinasi Penanganan Faham Radikal Wilayah Timur Tahun 2015

Tanggal Kegiatan: 2 September 2015



5. Pelatihan Verifikator dan Penyusunan Laporan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 2 s/d 4 September 2015



DOKUMENTASI KEGIATAN

BIDANG : PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

6. Orientasi Bela Negara dan Kewaspadaan Nasional Bagi Siswa-Siswi SMA/MA/SMK se-Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 12 s/d 13 Mei 2015





7. Outbond Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Konteks Bela Negara Bagi Generasi Muda Prov. NTB

Tanggal Kegiatan: 26 November 2015





8. Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Toga, Toma, Todat dan FKUB dalam rangka Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama dan Bermasyarakat di Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 22 s/d 23 April 2015



**9. Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Toga, Toma, Todat dan FKUB
Dalam Rangka Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama dan
Bermasyarakat di Prov. NTB**

Tanggal Kegiatan: 1 s/d 2 April 2015



10. Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Toga, Toma, Todat, Generasi Muda dan FKUB dalam Rangka Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama dan Bermasyarakat di Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 6 s/d 7 Oktober 2015



11. Focus Group Discussion (FGD) Labsite Kampung Madani

Tanggal Kegiatan: 21 November 2015



12. Seminar Akhir Draft Labsite Sosial Dalam Rangka Pengkajian/ Penelitian Kampung Madani

Tanggal Kegiatan: Desember 2015



13. Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi NTB

Tanggal Kegiatan: 20 s/d 21 Mei 2015



14. Operasi Darat Wilayah NTB

Tanggal Kegiatan: 29 Oktober 2015



15. Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Toga, Toma, Todat, Generasi Muda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. NTB

Tanggal Kegiatan: 29 s/d 30 September 2015



DOKUMENTASI KEGIATAN

BIDANG : PENGEMBANGAN POLITIK DAN FASILITASI ORPO/ORMAS

16. Peningkatan Kapasitas Partisipasi Ormas LSM dalam Pembangunan

Tanggal Kegiatan: 20 Maret 2015

